



# Siap Evaluasi Penuh

## Buntut Uang Belanja Wisatawan Turun

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Kondisi libur Lebaran pada tahun ini cukup terbilang sama dengan liburan akhir Tahun 2025 lalu. Kunjungan wisatawan membeludak. Namun, pedagang dan pelaku usaha mengeluh sepi penjualan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun tengah menyiapkan evaluasi menyeluruh. Terutama okupansi hotel yang berkaitan dengan pajak daerah, maupun pelayanan terhadap para wisatawan.

"Ya, kami sudah koordinasikan untuk dilakukan evaluasi. Karena trend saat ini banyak wisatawan yang memilih menginap di rumah kerabat, menyewa vila atau homestay," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, kemarin (26/3/2026).

Wawan menegaskan, kondisi ini memang perlu adanya kajian serius. Agar ada keadilan terhadap hotel atau penginapan yang memang membayar pajak resmi kepada pemerintah daerah.



HERI SURANTODUGLO JOGJA  
**Wawan Harmawan**  
Wakil Wali Kota Yogyakarta

"Tingkat hunian hotel belum menunjukkan angka maksimal," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo, mengungkapkan, okupansi hotel tahun lalu rata-rata 60 persen sampai 75 persen. Hal itu berbeda dengan Tahun 2026. Dimana penurunannya cukup banyak.

"Tahun ini rata-rata okupansi hotel pada periode pekan pertama libur Lebaran hanya berada di kisaran 40 persen sampai 65 persen," katanya.

■ **Baca SIAP.. Hal II**

# Siap Evaluasi Penuh

sambungan dari hal Joglo Jogja

Penurunan okupansi ini terjadi hampir merata di berbagai wilayah, termasuk kawasan Malioboro yang selama ini menjadi pusat aktivitas wisata.

Deddy menjelaskan, salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, prediksi lonjakan wisatawan

hingga 8,2 juta orang justru memicu kekhawatiran calon wisatawan akan kemacetan dan ketersediaan kamar.

Wakil rakyat di DPRD Kota Yogyakarta menangkap permasalahan ini. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat mendorong ada keadilan secara merata.

“Memang harus ada

penarikan pajak. Karena mereka menjual jasa. Harus dibuatkan payung hukum khusus,” ungkapnya.

Penarikan pajak terhadap homestay ini, kata Sinar, untuk memberikan persaingan sehat. Juga, memberikan keuntungan bagi wisatawan.

“Pelayanan jadi standard. Tidak hanya asal menyewakan rumah untuk

wisatawan. Jadi, pemerintah juga bisa melakukan intervensi,” imbuhnya.

Dengan pelayanan yang maksimal, menurut Sinar, jumlah kunjungan wisatawan akan kembali lagi. Pada akhirnya jumlah wisatawan yang menginap di hotel akan meningkat dan hotel mampu beroperasi dengan sehat. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005